

**DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM
MENANGGULANGI KASUS *ILLEGAL FISHING*
TERHADAP NELAYAN MALAYSIA TAHUN 2019-2024**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

THERESIA MARGARETH JANE SABATINI SITUMORANG

07041282126151

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENANGGULANGI KASUS
ILLEGAL FISHING TERHADAP NELAYAN MALAYSIA TAHUN 2019-2024**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh

Derajat Sarjana S-1 Dalam Bidang Hubungan Internasional

Oleh :

THERESIA MARGARETH JANE SABATINI SITUMORANG

07041282126151

Pembimbing

Tanda Tangan

Tanggal

Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int

NIP. 198805252023211033



15 Juli 2025



**Mengetahui,
Ketua Jurusan,**

**Solyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENANGGULANGI KASUS
ILLEGAL FISHING TERHADAP NELAYAN MALAYSIA TAHUN 2019-2024**

Skripsi

Oleh :

THERESIA MARGARETH JANE SABATINI SITUMORANG
07041282126151

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 24 Juni 2025

Pembimbing :

1. Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIP. 198805252023211033

Tanda Tangan



Penguji :

1. Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
NIP. 199012062019032017

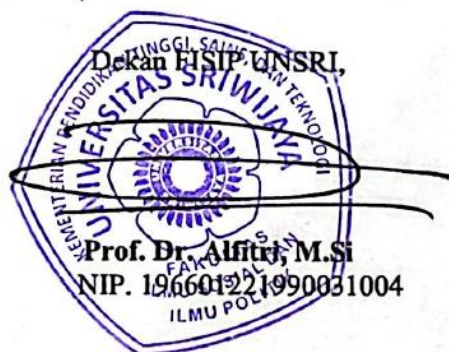
Tanda Tangan



2. Yuniarsih Manggarsari, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0002068711



Mengetahui,



Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Theresia Margareth Jane Sabatini Situmorang
NIM : 07041282126151
Tempat dan Tanggal Lahir : Samarinda, 29 Januari 2004
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Diplomasi Maritim Indonesia dalam Menanggulangi Kasus
Illegal Fishing terhadap Nelayan Malaysia Tahun 2019-
2024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Seluruh data, informasi, dan pernyataan yang terdapat dalam pembahasan serta kesimpulan karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya sendiri dengan arahan dari dosen pembimbing yang telah ditetapkan.

Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 18 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Theresia Margareth Jane Sabatini Situmorang
NIM. 07041282126151

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mengalir dari relung terdalam hati, kupersembahkan ungkapan terima kasih kepada Papa tercinta, Rahmat Situmorang, dan Mama terkasih, Surta Rita Marpaung. Dalam hening kalian terselip doa-doa yang menjelma menjadi cahaya penuntun di setiap langkahku, ketika dunia enggan tersenyum padaku, kehadiran kalian senantiasa menjadi pelabuhan tenang, alasan terindah untuk tetap bertahan dan melangkah. Semoga untaian kata dalam karya ini mampu menggambarkan secuil dari samudra kasih yang telah kalian limpahkan sejak tangis pertamaku di pangkuan dunia hingga detik ini aku berdiri menatap masa depan.

Kepada adik-adikku tersayang, Sheva Marcello Situmorang dan Ezekiel Amadeo Situmorang, terima kasih telah menjadi pelangi di tengah langit perjuanganku. Dalam canda dan tawa kalian, aku menemukan penghiburan saat lelah menyapa. Meski terkadang kita berselisih dalam riak kecil kehidupan, namun justru di sanalah warna-warni indah persaudaraan kita dilukis. Semoga kalian tahu, bahwa setiap pencapaian kakak tak pernah lepas dari doa dan cinta yang terjalin di antara kita.

Kepada Miranda Pakpahan dan Gerald David Pasaribu, terima kasih telah hadir tak hanya dalam tawa, tapi juga di tengah letih dan ragu. Di tengah hari-hari melelahkan, kita menemukan pelarian di dapur kecil kos Pak Kris yang meskipun sempit, tapi tawa yang hadir di sana jauh lebih lapang. Terima kasih telah membuat perjuangan ini tak terasa sendiri, dan begitu layak untuk dikenang. *May your paths be guided by peace, your hands strengthened by purpose, and your hearts always reminded that you are deeply loved.*

Kepada Fransiska Emma Aprilla Sembiring dan Rachel Uli Patricia Hutahaean, terima kasih telah mewarnai hari-hari perkuliahan dengan kehangatan yang tak ternilai. Hidup di perantauan yang awalnya terasa asing, menjadi rumah yang nyaman karena kalian ada di sana. *May the world forever greet you with kindness, and may its days be gentle upon your journey.*

Kepada diriku sendiri, terima kasih telah mempercayai diri sendiri, meski banyak rintangan yang menghadang, kerja keras yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuka jalan, satu per satu. Dan yang paling penting, terima kasih telah mempercayai bahwa setiap jatuh bukanlah akhir, melainkan bagian dari cara untuk tumbuh.

MOTTO

“Yesterday is a memory and a lesson, today is a reality and a hope for the future”

1 Petrus 5:7 berbunyi. “Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu.”

ABSTRAK

Praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan Malaysia menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia karena tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga menjadi pelanggaran terhadap kedaulatan negara serta berdampak pada kerusakan sumber daya kelautan. Pemerintah Indonesia menempuh langkah diplomasi maritim sebagai upaya preventif sekaligus menjaga stabilitas hubungan bilateral antara kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diplomasi maritim Indonesia dalam menanggulangi kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan Malaysia. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumen, yang memanfaatkan konsep Diplomasi Maritim menurut Christian Le Miere, meliputi diplomasi maritim kooperatif, diplomasi maritim persuasif, dan diplomasi maritim koersif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari diplomasi maritim kooperatif tercermin melalui pelaksanaan *review meeting* terhadap *MoU Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen of Malaysia and The Republic of Indonesia*, sedangkan diplomasi maritim persuasif diwujudkan melalui pelaksanaan Patroli Terkoordinasi Malaysia-Indonesia (Patkor Malindo), dan bentuk diplomasi maritim koersif ditunjukkan melalui penenggelaman kapal ikan asing (KIA) ilegal yang tertangkap melakukan praktik *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.

Kata Kunci: Diplomasi Maritim, Indonesia, *Illegal Fishing*, Malaysia, Joko Widodo, Poros Maritim Dunia

Indralaya, 18 Juli 2025

Mengetahui,

Pembimbing,



Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIP. 198805252023211033

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Solyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

The practice of illegal fishing by Malaysian fishermen has become a serious concern for the Indonesian government, as it not only results in economic losses but also constitutes a violation of national sovereignty and contributes to the degradation of marine resources. In response, the Indonesian government has adopted maritime diplomacy as a preventive measure while also aiming to maintain the stability of bilateral relations between the two countries. This study aims to analyze Indonesia's maritime diplomacy in addressing cases of illegal fishing committed by Malaysian fishermen. This research employs a descriptive qualitative method with data collection conducted through document analysis, using the concept of Maritime Diplomacy by Christian Le Miere, which encompasses cooperative maritime diplomacy, persuasive maritime diplomacy, and coercive maritime diplomacy. The findings of this study indicate that among the three forms of maritime diplomacy, the implementation of cooperative maritime diplomacy is reflected in the conduct of review meetings on the MoU Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen of Malaysia and The Republic of Indonesia; persuasive maritime diplomacy is realized through the implementation of the Coordinated Patrol between Malaysia and Indonesia (Patkor Malindo); and coercive maritime diplomacy is demonstrated through the sinking of illegal foreign fishing vessels (IFFVs) caught conducting illegal fishing activities within Indonesian waters.

Keywords: *Maritime Diplomacy, Indonesia, Illegal Fishing, Malaysia, Joko Widodo, Global Maritime Fulcrum*

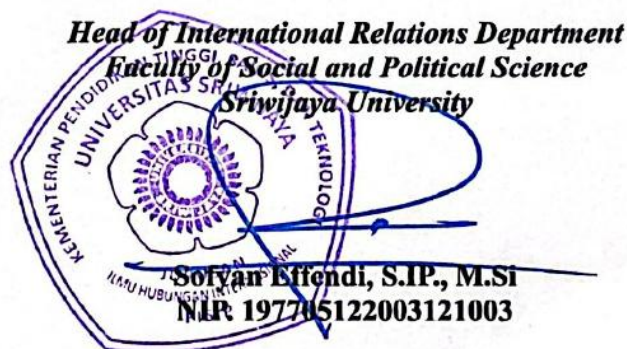
Indralaya, July 18th 2025

Acknowledge by,

Advisor,



Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIP. 198805252023211033



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah, kasih karunia, hikmat dan tuntunan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Diplomasi Maritim Indonesia dalam Menanggulangi Kasus *Illegal Fishing* terhadap Nelayan Malaysia Tahun 2019-2024”. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing serta mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc. dan Ibu Yuniarsih Manggarsari, S.Pd., M.Pd., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan serta arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar serta staf Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya, atas ilmu dan bantuan yang selalu diberikan kepada penulis.
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, semangat serta dukungan materil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Tante Sartika Marpaung atas subsidi token listrik yang tak pernah absen selama penulis menjalani kehidupan anak kos. Berkat subsidi tersebut, *air conditioner* dapat menyala 24 jam tanpa rasa bersalah sehingga proses penyusunan skripsi ini terasa lebih nyaman dan sejuk.
9. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur atas kesempatan dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama pelaksanaan KKHl.

10. Teman-teman Batak Pride atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah dibagikan selama perjalanan ini. Kehadiran kalian memberi warna yang turut membantu melalui berbagai proses dengan lebih ringan dan bermakna.
11. Maya Prasantika, *my sister from another mother*, terima kasih telah selalu menyediakan waktu untuk mendengarkan setiap cerita, menjadi tempat bersandar, dan memberikan dukungan sepanjang perjalanan ini.
12. Petrina Octavia, Rivaldo Panjaitan, Utari Nurhaliza, Adhitya Setyo, dan teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah membuat perjalanan akademik ini tidak hanya diisi oleh tugas dan ujian, tetapi juga oleh tawa, cerita dan kebersamaan yang menghangatkan.
13. Team Pesut, Mauren Felicia, Novynsqi, Alvianus Christian, terima kasih atas kebersamaannya sejak masa kecil hingga kini *on the way* menuju tua.
14. K-POP, J-POP, T-POP dan Ayam Pop, terima kasih telah memberi semangat, hiburan, dan kelezatan di tengah penatnya proses penyusunan skripsi. Musik mengisi ruang hati yang lelah, dan ayam pop mengisi perut yang kosong, keduanya berkontribusi besar dalam menjaga kewarasan penulis hingga titik akhir perjuangan ini.

Indralaya, 21 Juli 2024



Theresia Margareth J. S. S

07041282126151

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kerangka Konseptual dan Teori.....	14
2.2.1 Diplomasi Maritim.....	14
2.3 Alur Pemikiran.....	19
2.4 Argumentasi Utama	19
 BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Desain Penelitian	21
3.2 Definisi Konsep	21
3.2.1 Diplomasi Maritim.....	21
3.2.2 Illegal Fishing	22
3.3 Fokus Penelitian.....	22
3.4 Unit Analisis	24
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data	24
3.7 Teknik Keabsahan Data	25
3.8 Teknik Analisis Data	25
 BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	26
4.1 Gambaran Umum Indonesia-Malaysia	26

4.1.1 Letak Geografis Indonesia dan Malaysia	26
4.1.2 Deklarasi Djuanda dan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).....	28
4.2 Hubungan Bilateral Indonesia dan Malaysia	30
4.2.1 Hubungan Diplomasi Maritim Indonesia-Malaysia	32
4.3 Perjanjian Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Malaysia	33
4.4 Gambaran Umum Selat Malaka.....	34
4.4.1 Kondisi Geografis Selat Malaka.....	34
4.4.2 Sumber Daya Laut di Selat Malaka	35
4.5 Illegal Fishing di Indonesia	36
4.5.1 Kegiatan Illegal Fishing di Perairan Selat Malaka	37
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	39
5.1 Diplomasi Maritim Kooperatif	40
5.1.1 <i>Review Meeting MoU Common Guidelines Concerning Treatment Fisherman of Malaysia and The Republic of Indonesia</i>	41
5.2 Diplomasi Maritim Persuasif	54
5.2.1 Patroli Terkoordinasi Malaysia-Indonesia (Malindo).....	55
5.3 Diplomasi Maritim Koersif.....	64
5.3.1 Penenggelaman Kapal Ikan Asing (KIA) <i>Illegal</i>	65
BAB VI PENUTUP	69
6.1 Kesimpulan	69
6.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kapal Pelaku Illegal Fishing Tahun 2019-2024	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Batang Produksi Perikanan Menurut Subsektor (Ribuan Ton)	1
Gambar 1.2 Diagram Batang Ekspor-Impor Perikanan Indonesia Tahun 2019-2024.....	2
Gambar 2.1 Alur Pemikiran.....	19

DAFTAR SINGKATAN

AIS	: <i>Automatic Identification System</i>
ACF	: <i>ASEAN Coast Guard and Law Enforcement Forum</i>
APMM	: <i>Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BAKAMLA	: <i>Badan Keamanan Laut</i>
CBP	: <i>Common Best Practices</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
GPS	: <i>Global Positioning System</i>
IPOA-IUU	: <i>International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i>
JCBC	: <i>Joint Commission for Bilateral Cooperation</i>
KIA	: <i>Kapal Ikan Asing</i>
KKP	: <i>Kementerian Kelautan dan Perikanan</i>
MOU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
RMFO	: <i>Regional Fishery Management Organization</i>
ROD	: <i>Record of Discussion</i>
TLDM	: <i>Tentera Laut Diraja Malaysia</i>
TNI AL	: <i>Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut</i>
TOR	: <i>Terms of Reference</i>
TZMKO	: <i>Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie</i>
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
VMS	: <i>Vessel Monitoring System</i>
ZEE	: <i>Zona Ekonomi Eksklusif</i>

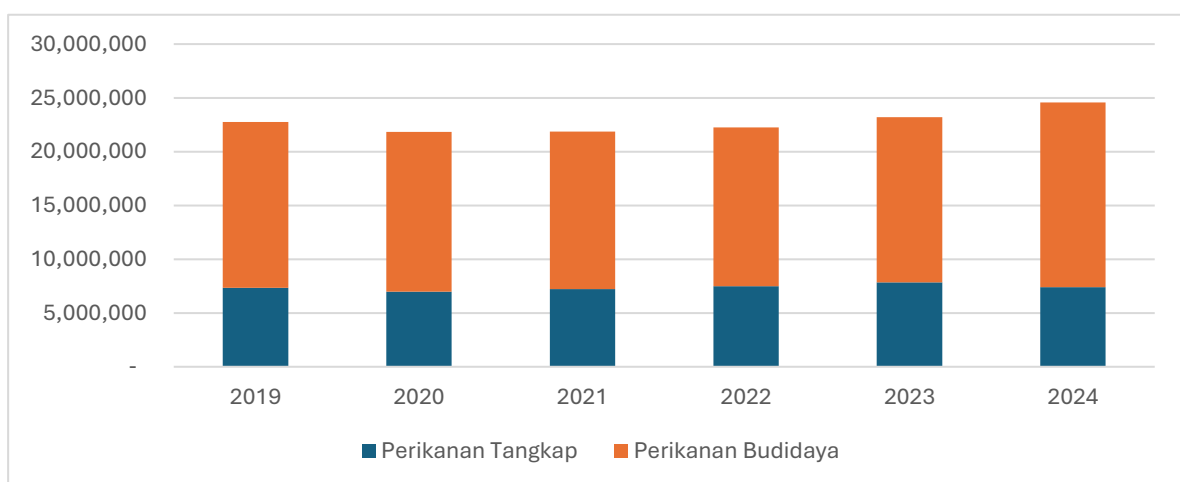
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang sekaligus memiliki karakteristik sebagai negara maritim. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, luas wilayah perairan Indonesia mencapai 6,4 juta km², antara lain terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 3 juta km² dan luas landas kontinen 2,8 km², dengan panjang garis pantai 108.000 km dan jumlah pulau lebih dari 17.500 (KKP, 2025). Letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menjadikannya sebagai negara yang sangat strategis di kawasan Asia Pasifik (Harris, Sudiarto, & Sutanto, 2022). Dengan karakteristik tersebut, wilayah laut Indonesia tidak hanya memiliki fungsi sebagai jalur konektivitas nasional dan internasional, tetapi juga menyimpan potensi sumber daya alam laut yang luar biasa besar dan bernilai tinggi secara ekonomi.

Gambar 1.1 Diagram Batang Produksi Perikanan Menurut Subsektor (Ribuan Ton)
2019-2024



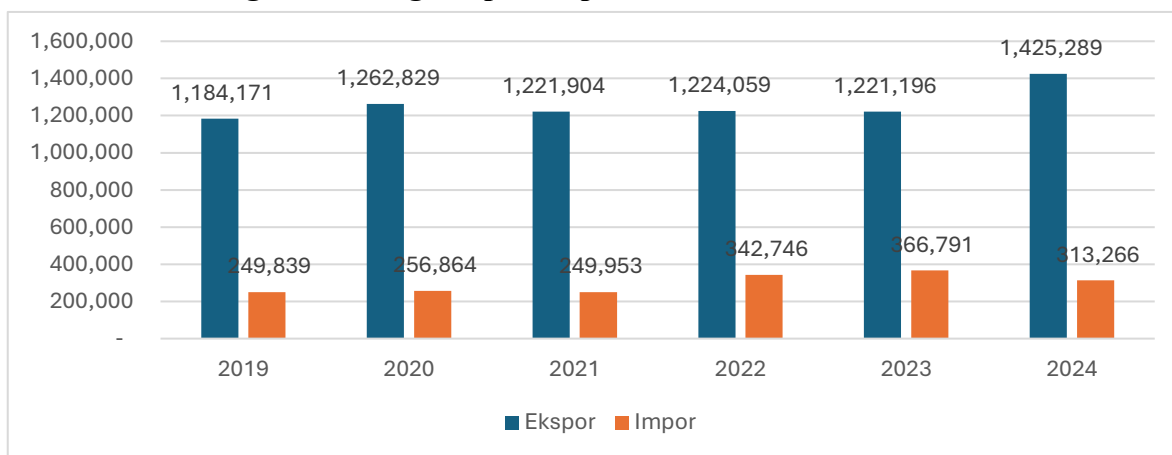
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perikanan Tangkap	7.335.322	6.989.090	7.224.500	7.489.395	7.845.601	7.392.836

Perikanan	15.425.62	14.845.01	14.648.30	14.776.05	15.361.42	17.182.0
Budidaya	4	4	9	6	5	11

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025

Potensi kelautan Indonesia tercermin dari tingginya produksi sektor perikanan nasional. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, dengan capaian lebih dari 17 juta ton pada tahun 2024. Sementara itu, produksi perikanan tangkap juga stabil di atas 7 juta ton per tahun. Kombinasi dari kedua subsektor ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara produsen hasil perikanan terbesar di dunia. Bahkan, Indonesia tercatat sebagai negara pengeksport bersih dalam sektor ini, dengan angka ekspor yang secara konsisten berada jauh di atas angka impor. Pada tahun 2024, ekspor hasil perikanan Indonesia meningkat lebih dari 200 ribu ton dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan betapa besar kontribusi sektor ini terhadap devisa negara.

Gambar 1.2 Diagram Batang Ekspor-Impor Perikanan Indonesia Tahun 2019-2024



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025

Selain potensi ekonominya, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Perairan Indonesia menjadi habitat bagi lebih dari 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang. Luas terumbu karang Indonesia diperkirakan mencapai 51.000 kilometer persegi, menjadikannya sebagai kawasan terumbu karang terbesar dan terkaya di dunia (KKP, 2024).

Keanekaragaman hayati ini tidak hanya menjadi sumber pangan dan penghidupan bagi jutaan masyarakat pesisir, tetapi juga merupakan kekayaan ekologi yang bernilai strategis dalam konteks ketahanan pangan dan konservasi global.

Sebagai negara dengan potensi sumber daya alam laut yang besar, Indonesia juga menghadapi berbagai ancaman serius yang mengancam kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya kelautan. Salah satu ancaman yang paling nyata adalah praktik *illegal fishing*. *Illegal fishing* di definisikan sebagai penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal nelayan dari negara lain yang memasuki wilayah yurisdiksi laut suatu negara tanpa izin dan melawan hukum negara tersebut (Djumala, 2021). *Illegal fishing* termasuk dalam kejahatan transnasional dengan kerugian besar (Leonardo & Deeb, 2022).

Illegal fishing memberikan dampak yang sangat serius terhadap kedaulatan Indonesia, baik dari aspek ekonomi, hukum, sosial, hingga pertahanan dan keamanan. Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO), praktik *illegal fishing* di Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp30 triliun per tahun, atau sekitar 25% dari total potensi perikanan nasional yang mencapai 1,6 juta ton per tahun (Maulana, 2009). Tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, *illegal fishing* juga merusak keberlanjutan lingkungan laut. Praktik penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak, seperti pukat harimau (*trawl*), telah mengancam ekosistem laut Indonesia. Alat ini tidak hanya menangkap ikan dewasa tetapi juga anakan ikan dan spesies non-target, serta merusak terumbu karang yang menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut. Kerusakan lingkungan ini mengancam kelestarian sumber daya ikan dan secara jangka panjang dapat memusnahkan kekayaan hayati laut Indonesia. Dari sisi hukum dan kedaulatan, praktik *illegal fishing* jelas merupakan ancaman terhadap integritas teritorial negara. Kapal-kapal asing yang masuk tanpa izin ke wilayah laut Indonesia merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional.

Berdasarkan Deklarasi Djuanda 1957, yang diperkuat oleh *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki hak penuh untuk mengelola dan mengawasi wilayah perairannya, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Bendar, 2015).

Salah satu wilayah perairan Indonesia yang sangat rentan terhadap praktik *illegal fishing* adalah wilayah perairan Selat Malaka. Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran internasional paling penting dan tersibuk di dunia, dengan panjang sekitar 800 km, lebar sekitar 65 km, dan kedalaman mencapai 22,5 meter (Fathun, 2019). Letaknya yang strategis di antara Pulau Sumatera (Indonesia) dan Semenanjung Malaka (Malaysia) menjadikannya sebagai penghubung utama antara Samudera Hindia di wilayah barat Asia dan Samudera Pasifik di Kawasan Asia Timur (Kawengian, 2017). Diperkirakan sekitar 60.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, mengangkut hampir sepertiga dari total perdagangan komoditas dunia (Kuppuswamy, 2004).

Secara geografis, salah satu negara tetangga yang berlokasi paling dekat dengan Selat Malaka adalah Malaysia. Negara bagian di Malaysia yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka adalah Kedah, Perlis, Melaka, Johor, Selangor, Negeri Sembilan, Perak, yang keseluruhan dari negara bagian ini terletak di Semenanjung Malaysia. Kedekatan geografis Malaysia dengan perairan Selat Malaka menciptakan peluang mobilitas tinggi bagi nelayan Malaysia untuk memasuki perairan yang diklaim Indonesia. Kondisi ini secara tidak langsung meningkatkan potensi terjadinya praktik *illegal fishing*, baik karena pelintasan batas wilayah tanpa izin maupun akibat ketidaktahuan terhadap batas maritim yang telah disepakati.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kapal ikan asing (KIA) yang terlibat dalam praktik *illegal fishing* di perairan Indonesia tahun 2019-2024 didominasi oleh tiga negara, yaitu Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Ketiga

negara tersebut secara konsisten menempati posisi teratas sebagai pelaku utama *illegal fishing*, dengan total 226 kapal yang tercatat.

Tabel 1.1 Jumlah Kapal Pelaku Illegal Fishing Tahun 2019-2024

No	Negara	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
1.	Vietnam	49 Kapal	23 kapal	25 kapal	7 kapal	1 kapal	1 kapal	106 kapal
2.	Malaysia	16 kapal	17 kapal	22 kapal	9 kapal	8 kapal	17 kapal	89 kapal
3.	Filipina	1 kapal	12 kapal	6 kapal	2 kapal	7 kapal	3 kapal	31 kapal
Total		226 Kapal						

Sumber: Laporan Kinerja KKP Tahun 2019-2022, Laporan Tahunan KKP 2023, dan Website KKP (Diolah penulis)

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1.1, Vietnam tercatat sebagai negara dengan jumlah kapal pelaku *illegal fishing* terbanyak di perairan Indonesia selama periode 2019-2024, dengan total 106 kapal. Posisi berikutnya ditempati oleh Malaysia dengan 89 kapal, dan Filipina dengan 31 kapal. Meskipun Vietnam menjadi negara dengan jumlah pelanggaran terbanyak, tren kehadiran kapal ikan ilegal asal negara tersebut menunjukkan penurunan secara bertahap dari tahun ke tahun. Sementara itu, Malaysia sebagai negara pelaku *illegal fishing* terbanyak kedua menunjukkan pola yang lebih fluktuatif. Pada tahun 2019, jumlah kapal asal Malaysia yang ditangkap sebanyak 16 kapal, meningkat menjadi 17 kapal pada 2020, dan kembali naik menjadi 22 kapal pada 2021. Namun, angka tersebut menurun signifikan pada 2022 menjadi 9 kapal, dan turun lagi menjadi 8 kapal pada 2023. Menariknya, pada tahun 2024 jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 17 kapal. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun Vietnam secara keseluruhan mendominasi jumlah pelanggaran, Malaysia justru menampilkan dinamika yang lebih fluktuatif selama lima tahun terakhir.

Sebagai respon terhadap maraknya praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh KIA Malaysia, Pemerintah Indonesia menempuh langkah diplomasi maritim sebagai upaya preventif sekaligus sebagai sarana untuk menjaga stabilitas hubungan bilateral antara kedua negara. Pendekatan diplomatik ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan nasional, tetapi juga sejalan dengan visi besar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada 20 Oktober 2014 (Setkab RI, 2019). Berdasarkan Peraturan Presiden 16 Taun 2017, Pasal 1 (2) disebutkan: Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Visi Poros Maritim Dunia tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat peran dan kedaulatannya di wilayah maritim, sekaligus menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan berdaulat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti diplomasi maritim yang dilakukan oleh negara Indonesia sebagai upaya untuk menanggulangi praktik *illegal fishing* terhadap nelayan Malaysia tahun 2019-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yakni **“Bagaimana Diplomasi Maritim Indonesia dalam Menanggulangi Kasus *Illegal Fishing* terhadap Nelayan Malaysia Tahun 2019-2024”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana diplomasi maritim Indonesia dalam menanggulangi kasus *illegal fishing* terhadap nelayan Malaysia tahun 2019-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan akan pengetahuan akademik, dan diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran terhadap pengetahuan bagi para pembaca.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional, serta dapat dijadikan bahan pembelajaran dan referensi kajian bagi mahasiswa Hubungan Internasional yang terkait dengan diplomasi maritim negara Indonesia khususnya dalam menanggulangi kasus *illegal fishing* terhadap nelayan Malaysia pada tahun 2019-2024.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menyusun strategi yang efektif guna menanggulangi kasus *illegal fishing* serta dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian lanjutan di bidang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- ActualNews. (2022, Desember 2). *Pangkoarmada RI Diwakili Danlantamal I Pimpin Pembukaan Operasi Patkor Malindo 158/22*. Retrieved from ActualNews: <https://actualnews.id/tni-polri/pangkoarmada-ri-diwakili-danlantamal-i-pimpin-pembukaan-operasi-patkor-malindo-158-22/>
- Amri, A. B. (2012, Januari 29). *Terkait nelayan, RI dan Malaysia bikin MoU*. Retrieved from Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/terkait-nelayan-ri-dan-malaysia-bikin-mou>
- Arsana, I. M. (2012, April 30). *Indonesia-Malaysia deal is good news for fishermen*. Retrieved from TheJakartaPost: <https://www.thejakartapost.com/news/2012/04/30/indonesia-malaysia-deal-good-news-fishermen.html>
- Bendar, A. (2015). Illegal Fishing sebagai Ancaman Kedaulatan Bangsa. *Jurnal Perspektif Hukum*.
- BPK RI. (2009, Oktober 29). *UU Nomor 45 Tahun 2009*. Retrieved from BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28119/UU%20Nomor%2045%20Tahun%202009.pdf>
- Cleary, M., & Chuan, G. K. (1999). *Environment and Development in the Straits of Malacca*. London: Routledge.
- CNN Indonesia. (2019, Desember 4). *TNI AL Kirim 2 Kapal Perang Patroli di Selat Malaka*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191204184834-20-454166/tni-al-kirim-2-kapal-perang-patroli-di-selat-malaka>
- Ditjen HPI. (2023). *Laporan Kinerja (LKJ) 2022*. Retrieved from Portal Kemlu: <https://kemlu.go.id/files/repositori/65413/LKJ%20FINAL%20DITJEN%20HPI%202022.pdf>
- Djalal, H. (2001). *Deklarasi Djuanda Menyatukan Kita*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Djumala, D. (2021). *Diplomasi Membumi: Narasi Cita Diplomat Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- DPR RI. (2019). *Jumlah Pulau di Indonesia*. Retrieved from DPR RI: <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20190425-125010-5297.pdf>
- FAO. (2005). *Model Plan for a Pacific Island Country*. Retrieved from Food and Agriculture Organization: <https://www.fao.org/4/a0126e/a0126e04.htm>

- Fathun, L. M. (2019). ASEAN Contemporary Security: Maritime Diplomacy in Handling of Maritime Security Threats in Malaka Strait. *Insignia: Journal of International Relations*.
- Fauzil, M. Y., & Burhanuddin, A. (2024). Prospek Hubungan Maritim Indonesia – Malaysia Pasca Kesepakatan Batas Laut 2023. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*.
- Friederich. (2019, Februari 20). *Patroli Koordinasi Malaysia - Indonesia 143/19 Resmi Dibuka di Belawan*. Retrieved from Jpnn.com: <https://m.jpnn.com/news/patroli-koordinasi-malaysia-indonesia-14319-resmi-dibuka-di-belawan>
- Gerke, S., & Evers, H.-D. (2011). Melaka Straits: A Narrow Band for World Trade. *Akademika*.
- Hadi, M. S., Wulan, M. K., & Susilo, N. (2023, Juni 9). *Indonesia-Malaysia Sepakati Batas Laut Setelah Berunding 18 Tahun*. Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/06/09/indonesia-malaysia-sepakati-batas-laut-setelah-berunding-18-tahun>
- Hanani, A. B. (2022, Maret 21). *KRI Lepu-861 dan Silea-858 Ikuti Patkor Malindo 155/22 di Selat Malaka*. Retrieved from ULASAN.CO: <https://ulasan.co/kri-lepu-861-dan-silea-858-ikuti-patkor-malindo-155-22-di-selat-malaka/>
- harianSIB.com. (2020, Februari 27). *Ciptakan Keamanan di Selat Malaka TNI AL dan TLDM Gelar Patkor Malindo 147/20*. Retrieved from harianSIB.com: <https://www.hariansib.com/Medan-Sekitarnya/259368/ciptakan-keamanan-di-selat-malaka-tni-al-dan-tldm-gelar-patkor-malindo-147-20/>
- Harris, A., Sudiarmo, A., & Sutanto, R. (2022). STRATEGI PERTAHANAN LAUT DALAM RANGKA ANCAMAN KEAMANAN DI ALUR LAUR KEPULAUAN INDONESIA II. *Jurnal Education and Development*.
- Hukum Online.com. (2020, Januari 9). *Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional untuk Kedaulatan Indonesia di Natuna*. Retrieved from Hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-natuna-lt5e16f5b67589c?-page=all>.
- indonesiadefense.com. (2020, Agustus 31). *TNI AL dan Tentara Laut Diraja Malaysia Gelar Patroli Bersama*. Retrieved from INDONESIA DEFENSE MAGAZINE: <https://indonesiadefense.com/passing-exercise-tni-al-dengan-tldm-untuk-tingkatkan-kerjasama-patroli-kedua-negara/>
- indonesiadefense.com. (2021, Maret 24). *Angkatan Laut Indonesia dan Malaysia Gelar Patroli di Selat Malaka*. Retrieved from INDONESIA DEFENSE MAGAZINE: <https://indonesiadefense.com/tni-al-dan-tldm-gelar-patroli-terkoordinasi-di-selat-malaka/>
- indonesiadefense.com. (2024, November 21). *Patkor Malindo 2024: Kapal Perang RI-Malaysia Latihan Manuver Taktis di Selat Malaka*. Retrieved from INDONESIA

- DEFENSE MAGAZINE: <https://indonesiadefense.com/patkor-malindo-2024-kapal-perang-ri-malaysia-latihan-manuver-taktis-di-selat-malaka/>
- indonesiadefense.com. (2024, Juni 13). *Patkor Malindo, TNI AL-Malaysia Keraahkan 4 Kapal Perang Jaga Selat Malaka*. Retrieved from INDONESIA DEFENSE MAGAZINE: <https://indonesiadefense.com/patkor-malindo-tni-al-malaysia-keraahkan-4-kapal-perang-jaga-selat-malaka/>
- Irhamna. (2021, Desember 17). *Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Terkait Penanggulangan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Di Selat Malaka Melalui MoU Common Guidelines Periode 2016-2019*. Retrieved from Repository UIN Syarif Hidayatullah: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63207>
- Jabodetabek.id. (2021, Desember 1). *Bakamla Bersama MKN Malaysia Bahas Implementasi MoU Common Guidelines*. Retrieved from Jabodetabek.id: <https://www.jabodetabek.id/info-jabodetabek/pr-692012877/bakamla-bersama-mkn-malaysia-bahas-implementasi-mou-common-guidelines>
- Jones, M. (2002). *Conflict and Confrontation in South East Asia 1961-1965 : Britain, the United States, Indonesia and the Creation of Malaysia*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Kawengian, A. D. (2017). Penolakan Indonesia Terhadap Kerjasama Keamanan Selat Malaka Terkait “Proliferation Security Initiative” dengan Amerika Serikat. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2021*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2022*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024, Juli 19). *Capaian Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024*. Retrieved from Kementerian Kelautan dan Perikanan: <https://www.kkp.go.id/download-pdf-akuntabilitas-kinerja/akuntabilitas-kinerja-pelaporan-kinerja-capaian-kinerja-kementerian-kelautan-dan-perikanan-tahun-2020-2024.pdf>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024, Desember 23). *KKP Tangkap 240 Kapal Pencuri Ikan Sepanjang 2024*. Retrieved from Kementerian Kelautan dan Perikanan: <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-tangkap-240-kapal-pencuri-ikan-sepanjang-2024-mqwr.html>

- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). *Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2023*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KKP. (2024, September 2). *"Tangkap-Manfaat", Kebijakan KKP Manfaatkan Kapal Ikan Illegal Bagi Nelayan Tradisional*. Retrieved from Kementerian Kelautan dan Perikanan: <https://kkp.go.id/news/news-detail/tangkap-manfaat-kebijakan-kkp-manfaatkan-kapal-ikan-ilegal-bagi-nelayan-tradisional-oVBK.html>
- KKP. (2024). *mengelola laut - untuk ekonomi biru*. Retrieved from Kementerian Kelautan dan Perikanan: <https://www.kkp.go.id/storage/Materi/bijak-mengelola-laut-untuk-ekonomi-biru67a1d1fb9efb3/materi-67a1d1fba2841.pdf>
- KKP. (2025). *Data Rujukan Nasional Kelautan*. Retrieved from SIDA KO KKKHL: <https://sidakokkhl.kkp.go.id/sidako/data-kelautan>
- Kumparan. (2024, September 3). *Keadaan Alam Malaysia, Letak Geografis, dan Sejarahnya*. Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/keadaan-alam-malaysia-letak-geografis-dan-sejarahnya-23RJ0Ujg1jH>
- Kuppuswamy. (2004). *Straits of Malacca: Security Implication*. Retrieved from <http://www.southasiaanalysis.org/paper1033>
- Kusumaatmadja, M. (2021). Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut Ke-III. *Indonesian Journal of International Law*.
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. Pustaka Pelajar.
- Leonardo, A., & Deeb, N. (2022). Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia: Problems and Solutions. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Purpose-Led Publishing.
- Malaysia Military Times. (2023, Desember 22). *Enhancing Maritime Security: Malaysia-Indonesia Op PATKOR MALINDO 162/23 Concludes Successfully*. Retrieved from Malaysia Military Times: <https://mymilitarytimes.com/index.php/2023/12/22/enhancing-maritime-security-malaysia-indonesia-op-patkor-malindo-162-23-concludes-successfully/>
- Maulana, A. (2009, April 17). *Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*. Retrieved from Digilib UIN SUKA: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2505/1/BAB%20I,%20BAB%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Miere, C. L. (2014). *Maritime Diplomacy in the 21st Century*. New York: Routledge.
- Nasith, W. S. (2024). *DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENANGANI ILLEGAL FISHING TERHADAP MALAYSIA DI SELAT MALAKA PERIODE 2020-2022*. Retrieved from Repository UIN Syarif Hidayatullah: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/79048/1/WIDYA%20ASABILA%20NASITH.FISIP.pdf>

- Nasution, N. (2018). *Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bina Insan Cita.
- Natalia, K. (2013). PENYELESAIAN PERMASALAHAN BATAS WILAYAH ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI PERAIRAN SELAT MALAKA DITINJAU DARI UNCLOS 1982. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* .
- Nugroho, H. B. (2012). LAW OF THE SEA ASPECTS OF INDONESIAN NATIONAL LEGISLATION ON SUBMARINE TELECOMMUNICATIONS CABLE. *Maritime Border Diplomacy*.
- Nurali, E. (2022, Juni 17). *Danlantamal I Terima Courtesy Call Satgas Patkor Malindo*. Retrieved from INDOSIBER: <https://indosiber.id/2022/06/17/danlantamal-i-terima-courtesy-call-satgas-patkor-malindo/>
- Pambudi, G. Y., Kusuma, A. I., & Fitriyono, R. A. (2021). TINJAUAN KRIMINOLOGIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING DI INDONESIA. *Jurnal Gema Keadilan* .
- PEN LANTAMAL I. (2019, September 16). *PATKOR MALINDO 145/19 RESMI DITUTUP* . Retrieved from LANTAMAL-I: <https://lantamal1-koarmada1.tnial.mil.id/NEWS/tabid/62/articleType/ArticleView/articleId/1744/PATKOR-MALINDO-14519-RESMI-DITUTUP.aspx>
- PEN LANTAMAL I. (2019, Mei 16). *PATROLI BERSAMA INDONESIA - MALAYSIA DI SELAT MALAKA RESMI DITUTUP*. Retrieved from LANTAMAL-I: <https://lantamal1-koarmada1.tnial.mil.id/NEWS/tabid/62/articleType/ArticleView/articleId/1709/Default.aspx>
- PEN LANTAMAL I. (2023, Maret 3). *KOMANDAN LANTAMAL I IKUTI OFFICIAL DINNER PATKOR MALINDO 159/23*. Retrieved from LANTAMAL-I: <https://lantamal1-koarmada1.tnial.mil.id/tabid/62/articleType/ArticleView/articleId/3355/Default.aspx>
- PEN LANTAMAL I. (2023, Juni 22). *PATROLI TERKOORDINASI MALAYSIA INDONESIA KE 160 TAHUN 2023 DITUTUP DI LANTAMAL I BELAWAN*. Retrieved from LANTAMAL-I: <https://lantamal1-koarmada1.tnial.mil.id/tabid/62/articleType/ArticleView/articleId/3410/Default.aspx>
- PEN LANTAMAL I. (2023, September 19). *PENUTUPAN PATROLI TERKOORDINASI MALAYSIA INDONESIA (PATKOR MALINDO) KE-161 TAHUN 2023 DI LANTAMAL I BELAWAN*. Retrieved from LANTAMAL-I: <https://lantamal1-koarmada1.tnial.mil.id/tabid/62/articleType/ArticleView/articleId/3465/Default.aspx>

- PEN LANTAMAL I. (2024, September 30). *PENUTUPAN OPERASI PATKOR MALINDO 165/24 DI LANTAMAL I*. Retrieved from LANTAMAL-I: <https://lantamall-koarmada1.tnial.mil.id/tabid/62/articleType/ArticleView/articleId/4979/Default.aspx>
- Portal Komando. (2019, November 27). *Bakamla RI Lakukan Review Meeting ke-6 Terkait Wilayah Tumpang Tindih dengan Malaysia*. Retrieved from PORTAL KOMANDO: <https://www.portal-komando.com/2019/11/bakamla-ri-lakukan-review-meeting-ke-6-terkait-wilayah-tumpang-tindih-dengan-malaysia/>
- Portal Komando. (2023, November 16). *Bakamla RI Menyelenggarakan 9th Review Meeting on MoU Common Guidelines RI-Malaysia*. Retrieved from PORTAL KOMANDO: <https://www.portal-komando.com/2023/11/bakamla-ri-menyelenggarakan-9th-review-meeting-on-mou-common-guidelines-ri-malaysia/>
- Pujayanti, A. (2015). Arah Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia di Masa Pemerintahan Jokowi. *Sekretariat Jenderal DPR RI*.
- Puspitawati, D. (2017). *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Putri, F. S., Ayuningutami, P. I., & Fitriyono, R. A. (2021). Kajian Kriminologi Terhadap Illegal Fishing di Selat Malaka. *Jurnal Gema Keadilan*.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.
- Rowlands, K. (2012). "Decided Preponderance at Sea": Naval Diplomacy in Strategic Thought. *Naval War College Review*, 89-103.
- SEAFDEC. (2022, Desember 9). *Fisheries Countryb Profile: Malaysia*. Retrieved from SEAFDEC-SOUTHEAST ASIAN FISHERIES DEVELOPMENT CENTER: https://www-seafdec-org.translate.goog/fisheries-country-profile-malaysia/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Setkab RI. (2019). *Indonesia Layak Jadi Negara Poros Maritim Dunia*. Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Sontani, R. (2020, Desember 24). *TNI AL dan TLDM gelar patroli bersama dan latihan di Selat Malaka*. Retrieved from Airspace Review: <https://www.airspace-review.com/2020/12/24/tni-al-dan-tldm-gelar-patroli-bersama-dan-latihan-di-selat-malaka/>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susetyorini, P. (2019). KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982. *Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No. 2*.
- Tempo.co. (2024, Desember 16). *Mengenal Letak Geografis Indonesia, Batas, dan Dampaknya*. Retrieved from Tempo.co: <https://www.tempo.co/politik/mengenal-letak-geografis-indonesia-batas-dan-dampaknya-1182181>
- Widodo. (2017). IMPLEMENTASI MOU COMMON GUIDELINES INDONESIA MALAYSIA TENTANG PERLINDUNGAN NELAYAN DALAM

PENANGANAN ILLEGAL FISHING DI SELAT MALAKA. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*.

Worlddata.info. (2025, April). *Malaysia: country data and statistics*. Retrieved from Worlddata.info: <https://www.worlddata.info/asia/malaysia/index.php>